

CONVERGENCE: JOURNAL OF GLOBAL DYNAMICS

Program Studi Hubungan Internasional, UIN Alauddin Makassar

ISSN: XXXX-XXXX (Print) | e-ISSN: XXXX-XXXX (Online)

PENDALAMAN HUBUNGAN STRATEGIS CINA DI MYANMAR PASCA KUDETA MILITER MELALUI ANALISIS ECONOMIC STATECRAFT

Fadhillah Hidayani¹, Aspin Nur Arifin Rivai²

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia. Email: tenriwulang00@gmail.com

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia. Email: aspin.arifin@uin-alauddin.ac.id

Abstract

This study investigates China's strategic economic engagement with Myanmar after the 2021 military coup, focusing on the deployment of economic statecraft through the Belt and Road Initiative (BRI). The objective is to understand how China's pragmatic approach in foreign economic policy supports its geopolitical interests while consolidating influence in Southeast Asia. A qualitative research method with a case study approach was adopted. Data were collected through document analysis, including official reports, academic literature, and international databases, analyzed using the theoretical framework of economic statecraft to reveal patterns of strategic behavior. Findings show that China has sustained and expanded its economic activities in Myanmar post-coup, maintaining close ties with the military regime through state-owned enterprises (SOEs). Projects like the China-Myanmar Economic Corridor (CMEC), deep-sea ports, rail infrastructure, and mining operations have bolstered China's strategic access to the Indian Ocean while insulating its interests from Western sanctions. The study reveals China's deliberate orchestration of commercial and diplomatic instruments to align Myanmar's economic dependency with its broader geopolitical vision, particularly reducing reliance on the Malacca Strait and securing energy routes. China's use of economic statecraft in Myanmar illustrates a proactive and calculated foreign policy strategy. Through infrastructure diplomacy and the mobilization of SOEs, China secures regional influence while advancing BRI goals. This study contributes to understanding power projection through economic instruments and suggests further research on comparative cases across the Global South.

Keywords: China–Myanmar relations; economic statecraft; Belt and Road Initiative; state-owned enterprises; infrastructure diplomacy; geopolitical strategy; Southeast Asia

Abstrak

Penelitian ini mengkaji keterlibatan strategis ekonomi Tiongkok di Myanmar pasca kudeta militer 2021, dengan fokus pada penggunaan economic statecraft melalui kerangka Belt and Road Initiative (BRI). Tujuan utamanya adalah memahami bagaimana pendekatan pragmatis kebijakan luar negeri ekonomi Tiongkok mendukung kepentingan geopolitik sekaligus memperkuat pengaruhnya di Asia Tenggara. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui analisis dokumen, termasuk laporan resmi, literatur akademik, dan basis data internasional, serta dianalisis menggunakan kerangka teori economic statecraft untuk mengidentifikasi pola perilaku strategis Tiongkok. Temuan menunjukkan bahwa Tiongkok tetap mempertahankan dan memperluas aktivitas ekonominya di Myanmar setelah kudeta, dengan menjalin kerja sama erat bersama rezim militer melalui peran dominan BUMN. Proyek seperti Koridor Ekonomi Tiongkok–Myanmar (CMEC), pelabuhan laut dalam, infrastruktur kereta api, dan pertambangan telah memperkuat akses strategis Tiongkok ke Samudra Hindia serta melindungi kepentingannya dari sanksi Barat. Studi ini mengungkap orkestrasi Tiongkok dalam menggunakan instrumen ekonomi dan diplomatik untuk menyelaraskan ketergantungan ekonomi Myanmar dengan visi geopolitik Tiongkok, khususnya dalam mengurangi ketergantungan pada Selat Malaka dan menjamin jalur energi. Penggunaan economic statecraft oleh Tiongkok di Myanmar mencerminkan strategi kebijakan luar negeri yang proaktif dan terencana. Melalui diplomasi infrastruktur dan mobilisasi BUMN, Tiongkok berhasil mengamankan pengaruh regional sembari mendorong tujuan strategis BRI. Studi ini memberikan kontribusi penting dalam pemahaman proyeksi kekuatan melalui instrumen ekonomi dan merekomendasikan penelitian lanjutan pada kasus serupa di kawasan Global Selatan.

Kata Kunci: Hubungan Tiongkok–Myanmar; economic statecraft; Belt and Road Initiative; badan usaha milik negara; diplomasi infrastruktur; strategi geopolitik; Asia Tenggara

PENDAHULUAN

Sebelum kudeta militer terjadi, hubungan antara Tiongkok dan Myanmar telah berkembang dengan baik terutama dalam konteks ekonomi, mengalami perkembangan dari hubungan bilateral menjadi hubungan yang lebih terbuka, baik dalam negeri maupun luar negeri (Soong & Aung, 2020). Pada tahun 2010 dan 2012, volume perdagangan bilateral keduanya mencapai US\$ 5,3 miliar. Hal ini menjadikan Tiongkok menggeser kedudukan Thailand sebagai mitra dagang terbesar bagi Myanmar. Impor dari Tiongkok sebesar US\$ 2,786 miliar dan ekspor Tiongkok sebesar US\$ 2,214 miliar. Lebih jauh lagi, investasi masif Tiongkok mencapai US\$ 8 miliar. 54% dari investasi tersebut difokuskan pada bidang energi, dan 31% pada minyak dan gas alam (Bi, 2014). Menurut kementerian perkonomian Myanmar, dari tahun 2016 hingga Januari 2021, jumlah investasi Tiongkok di Myanmar sebesar US\$ 3,5 miliar, menempatkan Tiongkok di urutan kedua setelah Singapura. Myanmar juga merupakan salah satu mitra strategis Tiongkok dalam inisiatif ambisius *Belt and Road Initiative* (BRI) (Alauddin, 2021).

Sejak militer Myanmar menggulingkan rezim demokratis, negara tersebut mengalami kemerosotan dalam krisis politik, ekonomi dan kemanusiaan yang semakin parah. Sebagai investor besar dan mitra dagang terbesar Myanmar, kesediaan Tiongkok untuk berbisnis dengan junta militer bisa menjadi sangat penting dengan kelangsungan rezim militer. Tiongkok mulai membina hubungan dengan Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) yang merupakan partai oposisi pada masanya. Hal tersebut sering kali dipandang pihak lain sebagai Tiongkok mendukung rezim militer atau bahkan memanfaatkan peluang untuk memajukan proyek mereka di Myanmar (China Global Newsletter, 2023). Beberapa investor asing menarik diri dari Myanmar akibat dari kudeta militer, berbanding terbalik dengan Tiongkok di mana melihatnya sebagai peluang strategis guna memasifkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam menggali keuntungan kerja sama sekaligus menerjemahkan imajinasi BRI yang semula dianggap banyak pihak sebagai misi pengglobalisasian yang tergolong ambisius. Olehnya itu, cengkraman rezim militer dalam mengelola tatanan ekonomi-politik domestik sejatinya dapat memfasilitasi proyeksi strategis Tiongkok ke depan

mengambil kesempatan tersebut dan manfaatkannya untuk memajukan BRI yang merupakan alat diplomasi andalan Tiongkok (W.Chan, 2021).

Menurut *Myanmar Economic Monitor* yang diterbitkan oleh *World Bank*, kondisi ekonomi di Myanmar tergolong stabil meskipun masih menghadapi berbagai tantangan (Glendinning, 2023). Konflik, ketidakstabilan politik yang semakin meningkat, serta krisis kemanusiaan yang terjadi pasca kudeta militer telah menyebabkan dampak yang lebih besar terhadap perekonomian Myanmar (Linn, 2023). Berbagai tantangan tersebut memberikan kekhawatiran kepada Tiongkok terhadap proyek-proyeknya. Sehingga Tiongkok tidak punya pilihan lain selain bekerja sama dengan junta militer demi menjaga kepentingan ekonomi dan strategisnya yang kuat di negara tersebut (Ramachandran, 2023). Tiongkok telah mendorong kerjasama “win-win” yang lebih baik dengan memperketat peraturan BUMN, mendorong tanggung jawab sosial perubahan yang lebih besar dan pembagian manfaat yang lebih luas dari proyek-proyek Tiongkok (Jones & Myo, 2021). Berdasarkan hal tersebut, maka penulis menemukan beberapa rumusan masalah yaitu, bagaimana relasi kerjasama, bentuk kerjasama dan bagaimana wujud dari konvergensi kepentingan Tiongkok dalam aktualisasi kerjasama tersebut pasca kudeta militer yang terjadi di Myanmar?

Kebijakan ekonomi menjadi salah satu instrumen kunci yang digunakan negara untuk mencapai tujuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakatnya. Pendekatan pragmatis pada kebijakan ekonomi digambarkan sebagai respon teradap tantagan yang berkembang pesat dan sering kali tak terduga (Atkinson-Grosjean & Fairley, 2009). Ekonomi pragmatis pada

Tiongkok mencerminkan pendekatan yang sangat berorientasi pada keuntungan dan pertumbuhan ekonomi (Pei, 2006). Pemerintahan Tiongkok telah sukses dalam mereformasi sistem ekonomi dan sosial, bermula dari perekonomian terencana yang relatif kecil berubah tatanan menuju perekonomian terbesar kedua di dunia. Hal tersebut membawa Tiongkok menjadi pusat percaturan politik internasional dan pemerintahan global yang menyorot pada mega proyek seperti BRI (Jing, 2017). Perwujudan proyek BRI tidak hanya memberikan peluang yang lebih besar untuk mewujudkan semakin matangnya pembangunan global, tetapi juga memberikan peluang yang lebih besar dan tepat waktu bagi pembangunan dan pengembangan Tiongkok sendiri (Johnston, 2018).

Selain kebijakan ekonomi, kepentingan politik yang strategis dapat memaksimalkan keuntungan ekonomi dari lingkungan politik. Persaingan dalam mendapatkan keuntungan, tidak hanya terjadi di dalam pasar tetapi juga melalui upaya dalam arena politik untuk memanipulasi peraturan, perundang-undangan, dan lembaga lain yang mengatur pasar (Henisz & Zelner, 2003). Terdapat berbagai strategi dan tujuan-tujuan yang akan dicapai Tiongkok melalui BRI, termasuk meningkatkan stabilitas regional, meningkatkan keamanan energi Tiongkok, dan memperkuat pengaruh strategis di Eurasia sambil menghindari persaingan langsung dengan AS (Wulthow, 2017).

KERANGKA PEMIKIRAN

Sebagai kebijakan strategis, Tiongkok telah mengambil langkah-langkah besar dalam memperkuat hubungan ekonomi dan politiknya dengan Myanmar melalui proyek Belt and Road Initiative (BRI) (Latief & Idrus, 2021). Ketegangan politik yang terjadi di Myanmar, tidak mengurungkan niat Tiongkok untuk mengakhiri kerjasama yang terjalin, Tiongkok malah menunjukkan keinginan untuk tetap terlibat dan melanjutkan kerjasama ekonomi diantara keduanya. Investasi Tiongkok di Myanmar merupakan bagian dari strategi BRI yang ditujukan untuk memperluas pengaruh ekonomi dan politiknya dikawasan tersebut (Rogers, 2023).

Sehingga untuk menganalisis fenomena tersebut, penulis menggunakan Economic Statecraft dalam melihat perilaku Tiongkok untuk mencapai tujuannya serta menghadapi tantangan yang muncul. Tiongkok cenderung terfokus pada menjaga hubungan ekonomi politik yang stabil dengan negara tersebut, sambil mempertahankan sikap diplomatik yang netral dan menolak campur tangan asing. Meskipun Tiongkok tidak secara terbuka mendukung kudeta militer, tetapi juga tidak mengutuk tuduhan tersebut secara keras.

Tiongkok memilih untuk mempertahankan hubungan yang pragmatis dengan pemerintahan yang berkuasa.

Aggarwal dan Reddie dalam tulisannya merekonseptualisasikan Economic Statecraft sebagai konsep kekuasaan struktural yang sejalan dengan pendapat Baldwin (1985) bahwa negara menggunakan alat ekonomi sebagai sarana untuk mencapai tujuan keamanan mereka. Perumusan Economic Statecraft mengacu pada literatur tentang ekonomi inovasi, namun memperluas cakupannya dengan membahas keamanan negara melalui kerangka sistem inovasi nasional. Inisiatif-inisiatif utama seperti BRI menghubungkan diplomasi pembelian dengan pembukaan pasar luar negeri untuk mengembangkan pemain seperti Tiongkok menjadi juara global (Anggarawal & Reddie, 2021). Negara-negara kuat seperti Tiongkok seringkali menggunakan alat ekonomi sebagai instrument politik untuk melakukan intervensi dalam hubungan internasional mereka dengan menggunakan alasan komersil (Brautigam & Xiaoyang, 2012).

Dalam karya James Reilly mendefinisikan Economic Statecraft sebagai penggunaan sumber daya ekonomi oleh para pemimpin politik untuk memberikan pengaruh dalam mencapai tujuan kebijakan luar negeri. Para pemimpin Tiongkok menggunakan kekayaan negara untuk tujuan strategis. Hal tersebut mencakup tiga strategi utama, yaitu penyediaan modal melalui bantuan luar negeri atau investasi langsung, memperluas perdagangan melalui perjanjian perdagangan preferensial atau pengadaan negara, dan mengubah kebijakan moneter seperti pembelian obligasi luar negeri atau investasi di pasar mata uang (Reilly, *China's Economic Statecraft: Turning Wealth Into Power*, 2013). William J. Norris dalam karyanya mendefinisikan Economic Statecraft sebagai manipulasi ekonomi yang disengaja oleh negara untuk memanfaatkan, memperkuat, atau mengurangi dampak strategis yang terkait eksternalitas (Norris, *Chinese Economic Statecraft: Commercial Actors, Grand Strategy, and State Control*, 2016). Jean-Marc F. Blanchard dan Norrim M. Ripsman juga beranggapan bahwa Economic Statecraft sebagai upaya dari negara pengirim untuk mempengaruhi negara target dalam melakukan sesuatu melalui manipulasi pasar dengan cara memberikan manfaat ekonomi bagi negara yang mematuhi, dan memberikan sanksi ekonomi terhadap negara yang tidak mematuhi (Blanchard & Ripsman, 2013).

William J. Norris mendefinisikan Economic Statecraft sebagai manipulasi ekonomi yang disengaja oleh negara untuk memanfaatkan, memperkuat, atau mengurangi dampak

strategis terkait eksternalitas yang dihasilkan oleh pelaku komersil. Manipulasi seperti ini terjadi melalui serangkaian alat kebijakan negara, termasuk sanksi, perpajakan, embargo, perjanjian perdagangan, pembekuan asset, kebijakan keterlibatan, manipulasi mata uang, subsidi, tarif, dan lain sebagainya (Norris, 2016). Dari beberapa pendefinisian mengenai Economic Statecraft, dapat disimpulkan bahwa Economic Statecraft sendiri merupakan konsep yang melibatkan penggunaan kekuatan ekonomi sebagai alat utama untuk mencapai tujuan politik, kemanan, dan kebijakan luar negeri suatu negara yang mencakup berbagai strategi seperti penerapan sanksi ekonomi, manipulasi perdagangan, penggunaan bantuan luar negeri, dan negosiasi perdagangan internasional.

Economic Statecraft digunakan Tiongkok untuk menggambarkan penggunaan sumber daya ekonomi dalam mencapai tujuan-tujuan yang mencakup bidang politik, ekonomi, dan strategis. Keterampilan Tiongkok dalam mengerahkan alat-alat ekonomi yang disertai dengan agresivitas yang ditunjukkan dalam memberikan tekanan komersial, keinginan untuk memperluas investasi dan bantuan kepada negara-negara miskin, skema global yang ambisius untuk membangun kembali infrastruktur komersial dan keuangan dunia sesuai dengan garis Sino-sentris merupakan cara untuk mempromosikan tujuan globalnya (Roberts, 2021).

Pemerintah Tiongkok menggunakan investasi asing, bantuan pembangunan, dan perdagangan sebagai alat untuk memperkuat hubungan dengan negara-negara lain, memperluas pengaruh politiknya dan mendukung kepentingan ekonominya yang mana sekaligus mendorong penerimaan ideologi dan kebijakan-kebijakan tertentu, terutama dalam konteks BRI yang merupakan proyek infrastruktur global ambisius. Dalam hal ini Economic Statecraft memberikan pandangan yang berguna dalam menganalisis bagaimana Tiongkok menggunakan alat-alat ekonomi untuk mempengaruhi dan memperkuat hubungan dengan Myanmar, meningkatkan ketergantungan ekonomi Myanmar pada Tiongkok, dan memperluas pengaruh politiknya di kawasan tersebut. Hal ini mencerminkan strategi Tiongkok dalam menggunakan alat-alat ekonomi untuk mencapai tujuan kebijakan luar negerinya dan memperkuat posisinya sebagai kekuatan ekonomi dan politik di Asia Tenggara.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini, penulis menggunakan jenis metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dan menggunakan analisis, menekankan pada subjek, proses, dan makna penelitian menggunakan landasan kerangka teori. Metode ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam dengan menganalisis kata-kata, pendapat, informasi, yang hasilnya kemudian dilaporkan (Fiantika, 2022). Metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus akan memperoleh pemahaman mendalam tentang suatu masalah atau fenomena. Hal ini merupakan serangkaian kegiatan ilmiah dilakukan secara menyeluruh dan mendalam terhadap suatu program, peristiwa, atau aktivitas, baik pada tingkat individu, sekelompok orang, lembaga, atau organisasi (Rusandi & Rusli, 2021). Menggunakan sumber-sumber dokumen dan literatur-literatur yang berasal dari web site resmi, laporan, jurnal, artikel dan buku.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kembalinya Rezim Militer Myanmar

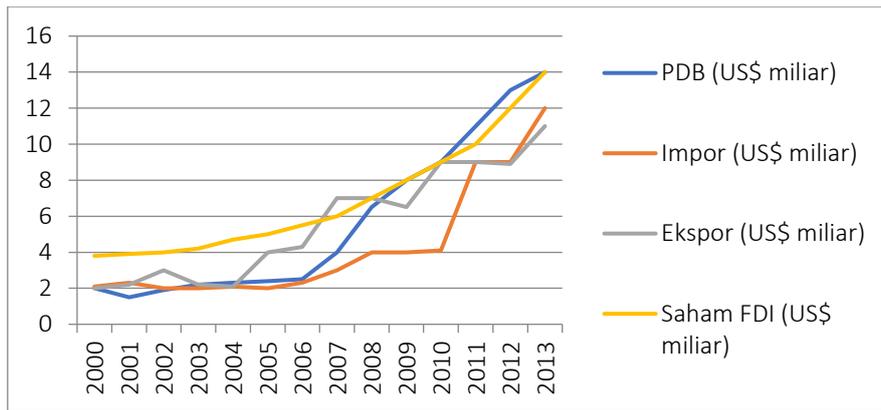
Myanmar yang dulunya dikenal dengan sebutan Burma, mendapatkan kemerdekaan dari Inggris pada tahun 1948. Setelah kemerdekaan, negara ini menghadapi ketidakstabilan politik yang signifikan dengan berbagai kelompok etnis dan politik yang berjuang untuk kekuasaan. Negara yang memiliki banyak kelompok etnis ini memunculkan ketegangan yang telah menjadi masalah yang berkelanjutan (Wirayudha, 2017). Di mana salah satu transformasi terpenting yang terjadi di Myanmar ialah transisi kekuasaan terbatas dari sosialisme ke kapitalisme yang ditandai dengan kejatuhan rezim dalam struktur kekuasaan negara didasari oleh pemberontakan kelompok komunis dan separatis etnis yang bermula di wilayah perbatasan.

Selama beberapa dekade, militer terus mengendalikan politik Myanmar. Militer beberapa kali membubarkan konstitusi yang ada dan memberlakukan aturan-aturan yang memastikan mereka tetap berkuasa. Memberikan mereka kendali langsung atas struktur pemerintahan dan memungkinkan mereka untuk menetapkan hukum yang memperkuat kekuasaan mereka. Serangkaian aksi protes terjadi, penolakan kompromi dengan kelompok militer. Di mana jalan satu-satunya memulihkan kekecewaan publik ialah dengan mengembalikan Myanmar ke jalan demokrasi. Di satu sisi, kelompok pro-demokrasi memperjuangkan demokratisasi, sementara kelompok komunis memperjuangkan sistem sosialisme dan komunisme yang diletakkan secara total (Jones, 2014). Tentara Myanmar lantas melakukan darurat sipil dengan cara membenarkan operasi pemberantasan kekacauan yang

disebabkan oleh kemarahan publik. Darurat sipil itu didasarkan oleh *State Law and Order Restoration Council* (SLORC) di mana pasukan bersenjata diperbolehkan menindak dan menghalau segala ancaman beserta potensinya dalam rangka menciptakan stabilitas keamanan domestik. SLORC dipandang sebagai jalan yang mempermulus kelompok militer memainkan peran koersif atau kekerasan terhadap kelompok pemberontak sekaligus segala potensi ancaman sipil sebagai dalil sekuritisasi (Jones, 2014).

Sebelum merdeka, Myanmar merupakan bagian dari kekaisaran Inggris. Banyak aset ekonomi strategis, seperti pertanian, pertambangan, dan perdagangan yang dikuasai oleh perusahaan-perusahaan Eropa. Di awal kemerdekaan Myanmar, sektor perekonomian masih dikendalikan oleh konglomerasi dan kelas kapitalis Eropa. Perusahaan-perusahaan dari Inggris, menguasai sektor-sektor penting seperti perdagangan beras, minyak bumi, dan kayu jati. Sementara, nasionalisme ekonomi belum menjadi ideologi arus utama kala itu. Kuatnya penetrasi kelas-kelas kapitalis Barat ke Myanmar disebabkan oleh satu faktor utama, yakni Myanmar merupakan wilayah yang dulunya menjadi basis kolonialisasi Inggris di awal dan pertengahan abad 20. Kendati kemerdekaan telah dicapai oleh masyarakat Myanmar, namun tidak secara otomatis tata kelola ekonomi-politik mereka sepenuhnya otonom. Industri-industri yang dinasionalisasi namun hanya beberapa kelompok etnis tertentu mendapatkan privilese seperti Bamar yang dapat menjalankan dan mengelola aktivitas dagang (Jones, 2014).

Pemulihan ekonomi lewat program nasionalisasi industri menjadi pilihan alternatif di awal kemerdekaan. Hanya saja pilihan tersebut tidak menjadi pandangan arus-utama. Hal ini disebabkan oleh penetrasi kekuatan kapitalis asing yang masih teramat dominan memengaruhi dan mengakses kekuasaan politik Myanmar yang disebabkan oleh adanya fragmentasi elit-elit pasca-kolonial, menjadikan kebijakan yang dijalankan menjadi ‘campur-aduk’. Satu sisi memperjuangkan kebijakan nasionalisasi, tetapi di saat bersamaan menjalankan liberalisasi ekonomi. Kebijakan kedua tersebut dipandang penting agar mendorong Myanmar mengejar ketertinggalan mereka di tengah adanya pasar global yang kian terintegritas. Lee Jones berpendapat, kebijakan liberalisasi memungkinkan Myanmar ikut serta dalam kompetisi ekonomi bebas dunia, hanya saja cara tersebut tidak sepenuhnya dipandang cermat. Justru, program dari liberalisasi itu sendiri menciptakan malapetaka baru yaitu lahirnya elit-elit ekonomi baru yang berasal dari kelompok bisnis (Jones, 2014).



Indikator Makroekonomi Myanmar

Sumber: UNCTAD (2016)

Trend ekonomi tersebut menunjukkan arti sederhana bahwa perekonomian Myanmar terus tumbuh secara dramatis. Tetapi hanya memberikan keuntungan pada elit militer. Pertumbuhan ini dipandang sebagai *achievement* yang digapai oleh kelompok militer yang tidak semata-mata memastikan stabilitas politik dan keamanan, melainkan juga menumbuhkembangkan ekonomi domestik. Sehingga memberikan tahap berikutnya mengapa kekuatan militer di Myanmar begitu kuat penetrasinya.

Sebagaimana juga disampaikan oleh Lee Jones bahwa cengkraman kuat elit ini disebabkan dua hal sekaligus. Pertama, elit ini membentuk liberalisasi ekonomi untuk memperkuat basis ekonomi mereka dan mendominasi aparatur negara yang lebih luas. Cara strategisnya ialah mengkonglomerasi sumber daya ekonomi melalui pembentukan badan usaha milik negara (BUMN) yang sepenuhnya dikendalikan oleh militer seperti *Union of Myanmar Economic Holdings Limited* dan *Myanmar Economic Corporation* yang bertujuan menyerap aset negara dan menarik investasi asing. Kedua, mendorong munculnya pengusaha nasional yang setia dan berguna bagi negara (Jones, 2018). Kelahiran kelompok-kelompok bisnis baru tersebut muncul akibat penetrasi militer sehingga keberasaan mereka sejatinya patuh dan berguna pada militer. Kemudian menjadikan kekuatan militer memainkan peran dan pengaruh superior dalam mengendalikan dan memantau jalannya negara.

Pemerintahan baru, berkomitmen akan formalitas terhadap investasi dan perilaku bisnis yang bertujuan pada pertanggungjawaban pembangunan yang berkelanjutan (Ford, Gillan, & Thein, 2024). Pada masa awal kemerdekaan Myanmar, pemerintah berusaha menjalankan kebijakan luar negeri yang independent dan non-blok. Myanmar mengambil Langkah dengan mengakui pemerintahan baru di Beijing pada saat itu. Pengakuan tersebut kemudian memperkuat hubungan bilateral diantara keduanya. Hubungan keduanya kembali menghangat pada tahun 1988, di mana Tiongkok menjadi sekutu terdekat junta militer Myanmar setelah

kudeta yang mendukung junta secara ekonomi dan diplomatik. Namun, transisi politik yang terjadi di Myanmar menuju pemerintahan kuasi sipil pada tahun 2010 mengubah dinamika tersebut. Hubungan dengan Tiongkok mengalami kondisi buruk karena pemerintah Myanmar yang baru membatalkan berbagai proyek yang di danai oleh Tiongkok dan memperluas hubungan diplomatik dengan negara-negara barat sebagai bagian dari reformasi dan keterbukaan yang dilakukan pemerintahan Myanmar (Kironkska & Jiang, 2023).

Meski demikian, kerjasama antara Myanmar dan Tiongkok kembali dihidupkan di bawah payung BRI, Tiongkok melihat peluang untuk memperdalam pengaruhnya melalui investasi infrastruktur dan proyek-proyek besar lainnya di Myanmar. Ketika krisis rohingya pecah dan militer Myanmar mendapat kritik keras dari negara-negara Barat, Tiongkok menolak untuk mengutuk Tindakan tersebut dan malah mendukung pemerintahan Myanmar. Tiongkok kemungkinan akan mengambil pendekatan pragmatis dengan berusaha menjaga stabilitas dan melindungi kepentingan ekonominya di Myanmar, sambil menghindari konfrontasi langsung dengan pemerintah militer yang baru (Kironkska & Jiang, 2023).

Penetrasi Tiongkok Melalui BRI

Sejak tahun 2013, *Belt and Road Initiative* (BRI) telah muncul sebagai inisiatif kebijakan luar negeri khas Presiden Xi Jinping. Inisiatif ini dianggap bertujuan untuk mengurangi dominasi negara-negara besar tertentu (seperti Amerika Serikat) dengan meningkatkan pengaruh dan keterlibatan Tiongkok dalam tatanan global (Jianing, 2018). BRI merupakan inisiatif konektivitas baru yang dipandang menguntungkan bukan hanya Tiongkok, melainkan juga negara mitra. Salah satu keuntungannya ialah menciptakan potensi interdependensi ekonomi. Tiongkok sendiri memandang kehadiran inisiatif tersebut sebagai wadah untuk menginternasionalisasi perusahaan-perusahaannya yang juga didasarkan oleh kebutuhan pencarian pasar baru sekaligus pencarian bahan mentah. Sementara itu, bagi negara mitra kehadiran BRI dipandang memfasilitasi kebutuhan pembangunan yang lebih mengedepankan kerja sama yang saling menguntungkan (Jones & Zeng, 2019).

Pemerintah Tiongkok menganggap kehadiran BRI bertujuan untuk meningkatkan kerjasama industri regional dan internasional. Kehadiran BRI memiliki rasionalitas perekonomian dari sudut pandang domestik, yaitu: (1) merangsang pertumbuhan ekonomi Tiongkok pasca krisis keuangan global pada tahun 2008; dan (2) menjadi mesin baru dalam menciptakan permintaan pasar yang lebih besar, terutama terhadap kelebihan kapasitas produksi dalam negeri seperti barang-barang berat. Kedua hal tersebut dapat digapai jika

dikombinasikan dengan mendorong perusahaan-perusahaan Tiongkok untuk bergerak aktif ke pasar global. Dengan kata lain, kehadiran BRI merupakan instrumen terpenting bagi kelanjutan internasionalisasi perusahaan Tiongkok yang sebelumnya dilakukan. Pemerintah Tiongkok mengakui bahwa BUMN dapat memainkan peran penting dalam meredam perlambatan ekonomi Tiongkok. Dari sisi BUMN, BRI penting untuk pengembangan dan perluasan usaha (Rivai & Virgianita, China Controls Business Actors to Implement Belt and Road Initiative as Connectivity Project, 2019).

Keterlibatan BUMN ke dalam BRI setidaknya melayani ambisi internasional Tiongkok di bawah komando Xi Jinping. Inisiatif konektivitas ini dipandang melayani kepentingan strategis melalui dua cara. Pertama, memperkuat legitimasi nasional Partai Komunis Tiongkok dengan menekankan kekuatan, kekayaan, dan kedudukan global yang dominan melalui proyek-proyek infrastruktur besar dan investasi. Kedua, memperkuat komitmen terhadap kebijakan luar negeri dan ekonomi yang proaktif dan strategis. Dukungan akan kebijakan *going out* pada perusahaan-perusahaan Tiongkok memberikan peluang besar di ranah pasar internasional untuk mengakses produk dan jasanya (Jones & Zeng, 2019).

Sejak BRI Tiongkok diluncurkan, pemerintah Myanmar telah beralih dari negara yang tidak memberikan dukungan apapun menjadi negara yang memberikan dukungan yang relatif kuat meski dilakukan dengan penuh kehati-hatian. Ditandai dengan pergeseran hubungan yang signifikan terutama terkait proyek-proyek inventasi dan inisiatif diplomatik, seperti pada perjanjian kerangka kerja pada proyek Pelabuhan Kyaukphyu dan proyek kawasan ekonomi khusus (KEK). Hubungan diplomatik yang kian membaik membuat perdagangan dan inventasi Barat yang ada di Myanmar tidak pernah bisa menggantikan posisi Tiongkok. Hal tersebut dapat dilihat pada uraian table berikut (Jones & Myo, 2021).

	1988/1989 - 2010/2011		2011/2012 - 2019/2020	
ASEAN	12, 761. 1	35%	26, 600. 2	54%
Tiongkok (termasuk Hong Kong)	15, 905. 3	44%	14, 918. 6	30%
Uni Eropa (termasuk Inggris)	3, 471. 2	10%	3, 671. 2	7%

Korea Selatan	2, 916. 9	8%	1, 076. 3	2%
Jepang	211.9	1%	1, 675. 4	3%
AS	243.6	1%	275.3	1%

Penanaman modal asing yang disetujui Myanmar: (US\$ Juta)

Sumber: DICA (2020).

	Ekspor		Impor	
	1995-2010	2011-2019	1995-2010	2011-2019
ASEAN	43%	34%	6%	40%
Tiongkok (termasuk Hong Kong dan Makau)	10%	34%	26%	32%
Korea Selatan	1%	3%	27%	5%
Jepang	5%	6%	0%	9%
India	14%	8%	2%	4%
Uni Eropa (termasuk Inggris)	14%	8%	6%	2%
US	4%	2%	3%	1%

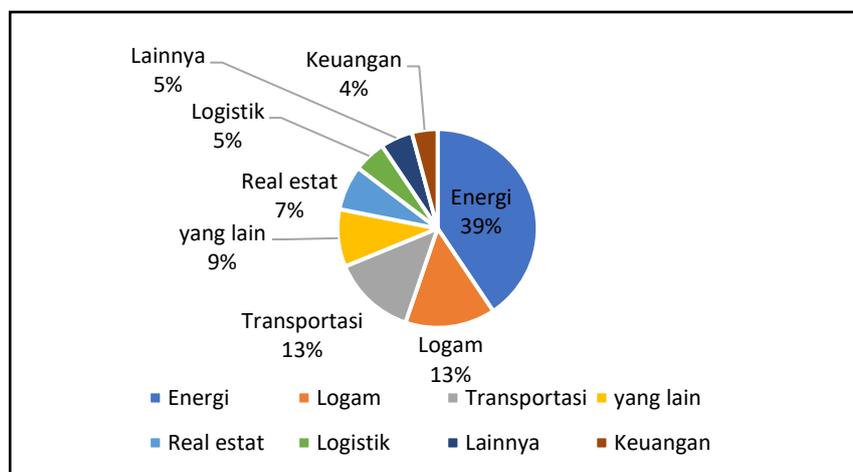
Mitra dagang utama Myanmar: total perdagangan

Sumber: UNCTAD (2020).

Berdasarkan table tersebut menunjukkan presentase investasi dan perdagangan terus menghadapi peningkatan. Tiongkok menjadi negara dengan total investasi dan perdagangan tertinggi dibandingkan dengan negara lainnya di Myanmar. Hal ini berimplikasi positif bagi pendalaman hubungan diplomatik (Jianing, 2018). Tiongkok menjadi negara dengan total investasi dan perdagangan tertinggi dibandingkan dengan negara lainnya di Myanmar. Hal ini berimplikasi positif bagi pendalaman hubungan diplomatik, walau dalam proses realisasinya mereka menghadapi berbagai tantangan (Jianing, BRI Calls for Joint Efforts by China, Myanmar, Belt and Road Portal , 2018). BRI memberikan kerangka kerja untuk dialog politik antara negara sepanjang Jalur Sutra, penghapusan hambatan dan pembangunan infrastruktur di seluruh negara yang terlibat, fasilitas perdagangan dan investasi, integrasi keuangan serta

pengembangan kontak antar masyarakat.

Sejak pengumuman peluncuran BRI, Tiongkok menjadi peserta yang sangat aktif dalam hubungan internasional. Tahun 2018, nilai perdagangan barang Tiongkok mencapai US\$ 4,623 miliar yang meliputi ekspor senilai US\$ 2,478 miliar sedangkan impor US\$ 2,136 miliar. Menurut China Global Investment Tracker, pada periode tahun 2013-2020 terdapat 459 investasi di bawah payung BRI dengan total nilai sebanyak US\$ 302,7 miliar. Pada kurun waktu tersebut total investasi proyek-proyek BRI mencapai 24%, di mana kesepakatan konstruksi BRI menyumbang 56% dari seluruh kontrak perusahaan-perusahaan Tiongkok (Kostecka-Tomaszewska & Krukowska, 2021).



Gambar 1: Investasi Global BRI Tiongkok pada tahun 2013-2020 (%)
Sumber: Perhitungan berdasarkan *China Global Investment Tracker* (2023).

Berdasarkan gambar diatas, menurut *China Global Investment Tracker*, pada periode tahun 2013-2020 terdapat 459 investasi di bawah payung BRI dengan total nilai sebanyak US\$ 302,7 miliar. Pada kurun waktu tersebut total investasi proyek-proyek BRI mencapai 24%, di mana kesepakatan konstruksi BRI menyumbang 56% dari seluruh kontrak perusahaan-perusahaan Tiongkok (Kostecka-Tomaszewska & Krukowska, 2021). BRI berhasil menjadi instrumen ekonomi politik dalam membantu dan mendukung proses pertumbuhan ekonomi Tiongkok serta memastikan ketersediaan praktik interdependensi kompleks. Tiongkok bersedia bekerjasama dengan Myanmar di berbagai aspek karena beberapa alasan strategis, ekonomi, dan politik yang akan saling menguntungkan. Tiongkok mendapatkan akses ke sumber daya, rute perdagangan, dan stabilitas regional. Sementara Myanmar menerima investasi, dukungan diplomatik, dan peningkatan infrastruktur.

Dalam hal memajukan pembangunan proyek kerjasama utama di Koridor Ekonomi

Tiongkok-Myanmar dalam kerangka pembangunan bersama BRI, ini akan memberikan lebih banyak manfaat bagi masyarakat lokal dan memberi mereka rasa kepuasan dan kebahagiaan yang lebih kuat. Tiongkok juga akan terus memberikan dukungan kepada Myanmar dalam menjaga hak dan kepentingan sah serta martabat nasional Myanmar di panggung internasional. Kedua negara telah mendorong pembangunan Koridor Ekonomi Tiongkok-Myanmar dalam kerangka BRI yang mana hubungan kerjasama mereka akan mengalami perkembangan yang lebih besar nantinya (Huaxia, 2020).

Momentum Internasionalisasi Bisnis Cina Pasca Kudeta Militer Myanmar

Dalam hubungan Tiongkok dan Myanmar, kedua negara tersebut sepakat memperdalam kerjasama di berbagai bidang dengan tujuan mendorong pembangunan berkelanjutan dengan norma kemitraan kerjasama strategis komprehensif di antara keduanya (Xinhua & Rahman, 2023). Pada kerjasama di bidang ekonomi dan bisnis, BRI masuk ke Myanmar sebagai jalur strategis yang sekaligus akan menguntungkan kepentingan Tiongkok. Diarahkan pada beberapa bidang utama, yaitu pembangunan infrastruktur, dukungan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan eksploitasi energi, di mana bagian-bagian tersebut akan mengkaji proyek-proyek besar (Kudo, 2006). Ekspansi dramatis BUMN Tiongkok ke luar negeri, dikatakan sebagai inti dari kebangkitan 'damai' Tiongkok. Sejak tahun 2010, lebih dari 30.000 perusahaan Tiongkok beroperasi di luar negeri yang setengah dari jumlah tersebut merupakan BUMN. Hal ini menunjukkan BUMN berperan sangat besar dalam menarik investasi luar negeri (Jones & Zou, 2017).

Rencana global Tiongkok ditujukan untuk memperoleh aset di luar negeri secara sistematis pada akhir abad 1999. Di mana kebijakan tersebut mendorong entitas bisnis untuk dapat berinvestasi dalam arena pasar luar negeri secara masif, seperti kemudahan akses pinjaman dari bank domestik dan dukungan informasi dari pemerintah. Dengan kata lain, kebijakan ini sebagai upaya pemerintahan Tiongkok untuk menginternasionalisasi jaringan perusahaannya. Kebijakan ini kemudian memberikan pengaruh signifikan terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi Tiongkok semenjak tahun 2000-an. BUMN dipandang sebagai aktor sentris dalam melengkapi modernisasi ekonomi Tiongkok. BUMN sering kali mendapatkan dukungan signifikan dari pemerintahan dalam bentuk investasi, kebijakan, dan regulasi yang menguntungkan, sehingga dapat berkontribusi besar dalam mempercepat transformasi dan modernisasi ekonomi Tiongkok (Rivai, 2022).

Strategi *going out* yang dijalankan Tiongkok dalam menginternasionalisasikan aktivitas BUMN merupakan sebuah upaya kerangka peraturan luas yang didorong oleh proses transformasi negara Tiongkok dan perkembangan ekonomi terkait. Di mana upaya untuk menciptakan kerangka peraturan yang luas di Tiongkok didorong oleh proses transformasi negara dan perkembangan ekonomi terkait. Reformasi dan pengembangan peraturan akan sejalan dengan perubahan struktural dalam negara serta kemajuan ekonomi.

Usulan Koridor Ekonomi Tiongkok-Myanmar (CMEC) merupakan bagian penting dari proyek ambisius BRI Tiongkok. Proyek ini mencakup dua hal, pertama, koridor fisik yang akan menghubungkan Provinsi Yunnan yang terkurung daratan di Tiongkok dengan Kyaukphyu melalui Mandalay dan Yangon dengan jalan baru dan jaringan kereta api berkecepatan tinggi. Kedua, koridor konseptual yang akan memerlukan integrasi ekonomi yang lebih besar melalui inisiatif seperti pembangunan kawasan industri, pemberian kuota perdagangan, dan keringanan pajak (Singh, 2018).

Dalam rencana CMEC tersebut, terdapat 24 proyek yang diusulkan dibangun, dengan perkiraan jumlah US\$ 2 miliar untuk tahap awal. Kemudian di bawah payung BRI terdapat beberapa proyek utama di Myanmar yang diantaranya juga tergabung dalam proyek CMEC ini, yaitu proyek Pelabuhan Laut Dalam Kyaukphyu, Proyek Pengembangan Yangon Baru, dan Tiga Zona Ekonomi perbatasan di Negara bagian Kachin dan Negara bagian Shan (Soong & Aung, 2020). Koridor ekonomi Tiongkok-Myanmar yang telah disepakati, dalam kurun waktu tahun 2019 hingga 2030, merupakan salah satu hasil konkret dari keterlibatan Myanmar dalam BRI. Pengembangan ekonomi, pembangunan infrastruktur, dan perdagangan jangka panjang ialah bentuk kerjasama yang melibatkan CMEC. Dalam menghadapi tekanan internasional dibutuhkan dukungan diplomatik untuk menghadapinya. Tiongkok hadir dan menawarkan investasi serta dukungan kepada Myanmar pada proyek-proyek CMEC. Dukungan tersebut merupakan salah satu cara yang ditawarkan Tiongkok untuk mengurangi tekanan akibat dari krisis di Myanmar, juga akan memberikan keuntungan kepada Tiongkok. Proyek tersebut akan memberikan akses yang strategis bagi Tiongkok ke Samudera Hindia, bagian terpenting bagi ekonomi dan strategi Tiongkok melalui Myanmar. Jalur alternatif tersebut, penting bagi Tiongkok untuk mengurangi ketergantungannya pada Selat Malaka yang rentan terhadap gangguan atau konflik (Chanda, 2021). Beberapa proyek yang tergolong dalam Koridor Ekonomi Tiongkok-Myanmar dapat dilihat dalam tabel berikut.

Proyek	BUMN Tiongkok	BUMN Myanmar	Tahun
--------	---------------	--------------	-------

<p>Infrastruktur (Transportasi)</p> <p>1. Kereta Api Muse-Mandalay</p>	<p>China Railway Eryuang Engineering Group (CREEC)</p>	<p>Myanmar Railway (MR)</p>	<p>Penandatanganan MOU (2014)</p> <p>Penandatanganan nota kesepahaman baru (2018)</p>
<p>2. Pelabuhan laut dalam Kyaukphyu dan Zona Ekonomi Khusus</p>	<p>China International Trust and Investment Cooperation (CITIC)</p>	<p>Kyaukphyu Special Economic Zone Deep Sea Port Company Limited</p>	<p>2016</p>
<p>Ekstraksi Tambang</p>			
<p>1. Tambang Tembaga Letpadaung</p>	<p>Wanbao Mining China North Industries Group Corporation Limited (NORINCO)</p>	<p>Myanmar Economic Holdings Limited (MEHL)</p>	<p>2010</p>

Proyek kerjasama Koridor Ekonomi Tiongkok-Myanmar

Infrastruktur

Pembangunan ekonomi negara yang termasuk sektor infrastruktur tidak hanya memberikan manfaat tambahan bagi penduduk Myanmar. Hal tersebut juga dibutuhkan untuk mencapai kebutuhan dasar masyarakat dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Keterbatasan pembangunan yang terjadi di Myanmar menjadi hambatan utama dalam upaya meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakatnya. Dengan adanya kerjasama melalui inisiatif BRI, menandai meningkatnya perekonomian Myanmar secara signifikan. Beberapa proyek utama telah terlaksana seperti pengembangan CMEC yang mencakup pembangunan pelabuhan, jalan raya, kereta api dan kawasan industri (O'Connor, 2011).

Tiongkok sebagai mitra kerjasama Myanmar, memainkan peran besar dalam pemabangunan infrastruktur negara tersebut, yang sekaligus mencerminkan kepentingan strategis Tiongkok di kawasan itu (Dean, 2022). *China Machinery Engineering Corporation* sebagai salah satu BUMN milik Tiongkok memainkan peran penting dalam pembangunan transportasi di Myanmar melalui kerjasama BRI. Salah satu perusahaan teknik dan perdagangan pertama di Tiongkok yang telah menjadi perusahaan internasional dengan kontraktor teknik dan pengembangan industri sebagai divisi inti (CMEC, 2016). CMEC didirikan berdasarkan organisasi pendahulunya, yaitu China National Machinery and Equipment Impor and Ekspor Corporation, yang didirikan pada tahun 1978 (Informa Markets, 2024).

Pada forum Belt and Road yang diadakan di Beijing tahun 2017 dan 2019, Aung San Suu Kyi menyetujui 9 proyek dari 30 proyek yang diusulkan Tiongkok pada bulan april 2019. Di mana ke 9 proyek yang disetujui tersebut, jika dilaksanakan memiliki potensi secara signifikan memajukan perekonomian Myanmar. Proyek-proyek yang kemudian mendapatkan persetujuan, dimulai di wilayah Muse, perbatasan utama Myanmar dengan Tiongkok yang mengarah kearah selatan Mandalay, menjadi titik pemisah dua cabang. Pertama, mengarah ke ibu kota komersial Yangon dan kedua, ke arah barat daya Kyaukphyu di Teluk Benggala. Pengembangan infrastruktur, terutama di wilayah Kyaukphyu dan sepanjang poros Mandalay hingga Kyaukphyu dianggap sangat penting karena akan meningkatkan konektivitas antara Myanmar dan Provinsi Yunan di Tiongkok. Pengembangan ini juga disertai dengan pembangunan jalan raya dan kereta api yang akan menghubungkan proyek lainnya (Millar, 2023).

Rencana pertama untuk membangun jalur kereta api yang mengubungkan Tiongkok dengan Myanmar dimulai pada tahun 2011 ketika pemerintah kedua negara menandatangani Momerendum of Understanding (MoU) yang tujuan membangun jalur kereta api antara Ruili dan Kyaukphyu melalui Muse. Namun, setelah perjanjian tersebut, tidak ada kemajuan yang di dapatkan dari pembangunan proyek, sehingga menimbulkan tentangan dari masyarakat setempat. Presiden Myanmar saat itu menghentikan proyek, yang sekaligus mengakhiri perjanjian pada tahun 2014 (Tritto & Park, 2020).

Kemudian pada bulan Oktober 2018, China Railway Eryuang Engineering Group (CREEC) dan Myanmar Railways (MR), perusahaan milik pemerintah Myanmar menandatangani nota kesepahaman baru, yang menyetujui untuk melakukan studi kelayakan

baru yang dimulai pada bulan Januari 2019 dan pada Agustus 2019. Jalur sepanjang 431 km dari Muse ke Mandalay ini sepenuhnya didanai oleh CREEC yang diusulkan memiliki 36 stasiun dan melewati 11 kota-kota yang diperkirakan menelan biaya sekitar US\$ 7 miliar (Tritto & Park, 2020).

Proyek kereta api tersebut merupakan jalur terpanjang kedua setelah proyek Yangon-Mandalay di Myanmar. Dengan panjang 431 km menggunakan inovasi kereta listrik yang dapat melaju dengan kecepatan 160 km perjam. Penggunaan kereta listrik membantu mengurangi emisi karbon juga memastikan operasi yang lebih tenang dan efisien (Htut, 2019). Proyek kereta api Listrik Muse-Mandalay merupakan mega proyek CMEC yang dirancang untuk memfasilitasi pengangkutan barang dari provinsi Yunnan di Tiongkok, yang juga merupakan kawasan ekonomi khusus Kyaukphyu di Myanmar (Yu K. , 2021).

China Railway Eryuang Engineering Group (CREEC) merupakan perusahaan survei, desain multi-industri dan komprehensif terbesar di Tiongkok. Perusahaan ini merupakan inti dari China Railway Group yang mendapat dukungan dari pemerintah Tiongkok dan bekerja di bawah pengawasan Kementerian terkait. Banyak proyek yang diinisiasi mendapatkan pendanaan dari lembaga keuangan milik negara yang mana memperlihatkan bahwa kebijakan dan proyek yang diusulkan selaras dengan tujuan nasional Tiongkok (China Railway Eryuan Engineering Group (CREEC), 2014). *Myanmar Railway* (MR) yang merupakan sebuah badan usaha milik negara (BUMN) Myanmar di bawah kendali Kementerian transportasi dan komunikasi, melakukan Kerjasama dengan CREEC dalam studi kelayakan proyek kereta api Muse-Mandalay sebagai bagian dari MoU yang sudah disepakati dan ditandatangani pada tahun 2018 (Sandi Governance Institute, 2021). Jalur kereta api Muse-Mandalay menghubungkan Yunnan dengan pusat-pusat komersial penting di Myanmar di bawah dorongan besar perdagangan dan infrastruktur Tiongkok yang sejalan dengan BRI. Proyek kereta api ini juga menghubungkan Yunnan dengan Zona Ekonomi Khusus Kyaukphyu dan pelabuhan laut dalam (Kyi & Zaisheng, 2020). Selain CREEC dan MR, beberapa perusahaan atau BUMN dari Tiongkok juga terlibat dalam proses Pembangunan proyek kereta api Muse-Mandalay. Seperti China Communications Construction Company Ltd (CCCC) dan China Harbour Engineering Company Ltd, dalam pengembangan sektor transportasi yang terkait dengan proyek ini. Melibatkan pembangunan 124 jembatan, 60 terowongan, dan 11 stasiun listrik. Perusahaan-perusahaan tersebut bekerja sama dengan MR dan Kementerian Transportasi dan Komunikasi Myanmar dalam memastikan keberhasilan proyek dan

mendukung inisiatif BRI (Hsu & Munich, 2024).

Kemudian, internasionalisasi BUMN Cina pula berurusan pada sektor infrastruktur transportasi maritim. Wilayah Kyaukphyu di Myanmar merupakan lokasi strategis bagi proyek Pelabuhan laut dalam. Di mana memiliki peran strategis yang penting bagi ekonomi dan strategis geopolitik Tiongkok. Kyaukphyu merupakan kota pesisir di sepanjang Teluk Benggala negara bagian Rakhine, paling barat Myanmar. Dulunya wilayah tersebut merupakan pangkalan angkatan laut Kerajaan Inggris yang saat ini telah terhubung dengan kota-kota lain melalui jalur kereta api dan jalan raya. Pada tahun 2007, pemerintahan Myanmar mengumumkan keputusannya untuk membangun kawasan ekonomi khusus di pelabuhan tersebut dan menandatangani kontrak kerjasama dengan pemerintah Tiongkok untuk mengembangkannya. Keputusan tersebut memperkuat hubungan yang terjalin dengan Tiongkok (Sun & Zoubir, 2018).

Fokus pengembangan pelabuhan laut dalam ini mencapai US\$ 7,3 miliar disertai dengan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) senilai US\$ 2,7 miliar. Dorongan Tiongkok untuk memulai pembangunan pelabuhan Kyaukphyu di Myanmar merupakan bagian dari strategi yang lebih besar untuk meningkatkan konektivitas perdagangan dan mengurangi ketergantungan pada rute maritim yang beresiko. Perusahaan-perusahaan Tiongkok telah mendapatkan izin untuk menyewa pelabuhan tersebut selama 50 tahun dengan kepemilikan 70%, sementara 30% saham dimiliki Myanmar yang mewakili lebih dari 4% PDB negara tersebut pada tahun 2023 (Cameron, 2023).

Proyek pelabuhan ini mempunyai dua kawasan pelabuhan. Pertama, pelabuhan laut dalam (bagian utara) dengan luas pelabuhan 2,7 km², halaman kargo seluas 1,5 km², dan halaman pembuatan kapal seluas 1,4 km². Kedua, pelabuhan laut dalam (bagian selatan) dengan luas pelabuhan 3 km² dan lapangan pertanian kapal seluas 1,5 km² (Min & Kudo, 2012). Pada tahun 2016, anak perusahaan CITIC Group Corporation Tiongkok bersama China Harbour Engineering Company (CHEC), memenangkan kontrak untuk dua proyek besar di kota tersebut. Pengerukan pelabuhan laut dalam dan pembuatan kawasan industri di zona ekonomi khusus yang bernilai US\$ 7,3 miliar pada pelabuhan dan senilai US\$ 2,7 miliar pada zona ekonomi khusus (Poling, 2018).

China International Trust and Investment Corporation (CITIC) Group merupakan investor terbesar atau perusahaan utama dalam memimpin proyek pelabuhan ini, bersama

dengan anak perusahaannya China Harbor Engineering Company (Demir, 2023). salah satu konglomerat terbesar Tiongkok dan konstituen Hang Seng yang menempati indeks pasar saham utama di Tiongkok. CITIC telah berkembang seiring dengan kebangkitan dan modernisasi Tiongkok. Membangun portofolio bisnis luas yang luar biasa di bidang jasa keuangan, manufaktur, material, konsumsi, dan urbanisasi (CITIC Limited , 2020). CITIC memiliki prioritas kerja yang berupaya memperdalam reformasi BUMN, memperkuat inovasi teknologi, dan mengintegrasikan ke dalam strategi regional (CITIC Group, 2022).

Proyek ini mempunyai luas 4.289,32 hektar – 607,88 hektar untuk proyek pelabuhan, kemudian 2.446,07 hektar untuk proyek zona industri (Eleven Media Group, 2020). Baik Myanmar dan Tiongkok telah secara aktif bekerja sama dalam pekerjaan awal proyek, mulai tahun 2022 telah dilakukan survei geo-topografi awal serta penilaian dampak lingkungan dan sosial yang dimaksudkan untuk menganalisis dan menilai potensi dampak lingkungan dari konstruksi dan pengoperasian proyek di masa depan, juga untuk mengembangkan langkah-langkah mencegah atau memitigasi dampak buruk (Tessarone, 2023).

Bersama dengan proyek pelabuhan Kyaukphyu, ada juga Zona Ekonomi Khusus Kyaukphyu di Myanmar yang merupakan salah satu proyek investasi Tiongkok bernilai miliaran dolar. Pengembangan KEK mencerminkan ekonomi politik dan tata kelola pemerintahan Myanmar yang bersifat kuasi-sipil dan didukung oleh militer. Direncanakan memiliki fasilitas pelabuhan laut dalam, zona industri, dan proyek perumahan kelas atas di lahan seluas 4.300 hektar. Proyek ini bertujuan untuk menciptakan peluang kerja bagi penduduk asli Rakhine di wilayah tersebut melalui penarikan investasi asing langsung ke negara bagian barat dan menghasilkan pendapatan pajak yang dapat meningkatkan standart hidup lokal (Sandhi Governance Institute, 2021).

Ekstraksi Tambang

Tambang Tembaga Letpadaung merupakan proyek penambangan tembaga terbesar di Myanmar. Salah satu proyek yang mendapatkan persetujuan oleh rezim militer Myanmar setelah transisi politik pada tahun 2011. Proyek ini terletak pada wilayah Salingyi Township, Sagaing Region, Myanmar, yang juga merupakan proyek tembaga hidrometalurgi terbesar di Asia (Yu P.-H. , 2021). Pada bulan Juni 2010, Perdana Menteri Tiongkok dan Presiden Myanmar bersama-sama menyaksikan penandatanganan perjanjian bagi hasil antara Wanbao Mining anak perusahaan dari China North Industries Group Corporation Limited (NORINCO) dengan Myanmar Economic Holdings Limited (MEHL). Kerjasama tersebut berfokus pada eksplorasi dan pengembangan sumber daya mineral di Myanmar, yang memiliki

potensi besar dalam hal deposit mineral. MEHL memiliki izin produksi mineral skala besar dan bertanggung jawab atas pembebasan lahan, sedangkan Wanbao Mining bertanggung jawab atas investasi, pengembangan, dan pengelolaan proyek. Perjanjian yang disepakati, memberikan hak kepada Wanbao Mining sebesar 49% dari laba bersih proyek dan 51% untuk MEHL (Ji, 2022).

China North Industries Group Corporation Limited (NORINCO) merupakan perusahaan yang berperan besar dan berpengaruh dalam industri pertahanan internasional, aktif dalam inisiatif pembangunan global, dan berusaha untuk memperluas operasinya ke sektor pertambangan dengan visi yang luas dan ambisius. Secara aktif telah melakukan eksplorasi, pengembangan, produksi dan perdagangan sumber daya minyak dan mineral di luar negeri (NORINCO, 2014). Sedangkan, Myanmar Economic Holdings Limited (MEHL) ialah konglomerat yang memiliki hubungan erat dengan militer Myanmar. Perusahaan tersebut memiliki kepentingan bisnis yang mencakup perekonomian Myanmar, mulai dari perbankan, perdagangan, logistik, konstruksi, pertambangan, pariwisata, pertanian, tembakau, makanan dan minuman. Dengan jaringan dan pengaruhnya yang luas, MEHL memainkan peran kunci dalam memfasilitasi kerjasama internasional di Myanmar. Struktur kepemilikan yang didominasi oleh entitas militer, mencerminkan hubungan simbolik antara bisnis dan militer. Hal ini menyoroti bagaimana sumber daya ekonomi digunakan untuk mendukung struktur kekuasaan militer di negara tersebut (Sandhi Governance Institute, 2021).

Tambang tembaga Letpadaung yang dioperasikan oleh Wanbao Mining Ltd Tiongkok tersebut merupakan salah satu proyek percontohan di bawah kerangka inisiatif BRI. Dengan siklus produksi selama 30 tahun, tambang tembaga Letpadaung telah memberikan manfaat jangka panjang dan tetap bagi perusahaan Tiongkok dan pemerintahan Myanmar, perusahaan, serta komunitas dan karyawan. Tambang tersebut telah memainkan peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Myanmar dan meningkatkan penghidupan penduduk. Proyek tersebut menggunakan teknologi dan manajemen canggih dari seluruh dunia, yang pada gilirannya memberikan kontribusi besar terhadap pendapatan pajak negara tersebut. Hal ini menunjukkan adanya manfaat ekonomi yang signifikan dari kerjasama internasional yang berlangsung (Lancang-Mekong Cooperation, 2020).

Kekhawatiran Tiongkok akan Myanmar telah berhasil diredakan melalui berbagai proyek infrastruktur strategis, seperti pembangunan kereta api, pelabuhan, kawasan ekonomi khusus, dan perluasan tambang tembaga Letpadaung. Melalui proyek-proyek tersebut, Tiongkok tidak hanya memperkuat hubungan bilateralnya dengan Myanmar tetapi juga menandai perubahan politik dan ekonomi yang signifikan di wilayah tersebut. Investasi skala besar dalam proyek-proyek yang berjalan memberikan Tiongkok dan BUMN nya akses yang lebih baik ke pasar internal Myanmar dan memperkuat jalur perdagangan yang mendukung BRI. Tiongkok memberikan peran penting kepada Myanmar, baik pada masa pemerintahan sipil maupun militer, Tiongkok tetap mempertahankan hubungannya dengan Myanmar bahkan ketika pemerintahan Myanmar mengalami kemunduran dan ketidakstabilan politik. Hal tersebut menyoroti keberhasilan strategi Tiongkok dalam efektivitas pembangunan infrastruktur dan memperkuat posisinya sebagai pemain utama dalam perekonomian dan

politik regional Myanmar.

Sejalan dengan status Tiongkok sebagai negara perekonomian terbesar kedua di dunia, penggunaan economic statecraft diperlihatkan dalam bentuk inisiatif yang lebih konkrit dan lebih agresif. Menunjukkan strategi Tiongkok dalam mendorong investasi keluar oleh perusahaan-perusahaan Tiongkok yang dikemas ke dalam BRI telah berkembang menjadi inisiatif global dan memiliki jangkauan luas (Wong, 2019). Di mana tujuan dari economic statecraft Tiongkok sangat berkaitan dengan ambisi Tiongkok untuk mendominasi ranah regional atau global, ataupun untuk menciptakan pengaruh bagi negara-negara tetangganya di Asia Tenggara, seperti di Myanmar (Ferchen & Mattlin, 2023).

Perspektif strategi going out Tiongkok dalam menginternasionalisasikan aktivitas BUMN, bukanlah perampasan sumber daya yang diarahkan oleh negara, melainkan sebuah upaya kerangka peraturan yang luas dan didorong oleh proses transformasi negara Tiongkok dan perkembangan ekonomi (Jones & Zou, 2017). Lee Jones mengemukakan transformasi negara sebagai kelompok-kelompok penguasa yang menyesuaikan struktur pemerintahan dengan kebangkitan globalisasi, dan secara mendasar melakukan perubahan terhadap struktur pemerintahan negara. Transformasi ini terbagi menjadi tiga pembahasan yaitu, pertama fragmentasi kekuasaan negara yang bermula dari reformasi negara sedikit demi sedikit dan bergerak menuju tata kelola regulasi yang lebih baik, di mana aturan dan regulasi diimplementasikan dengan cara yang lebih terstruktur dan efisien. Privatisasi BUMN dan penghapusan kementerian serta lembaga yang menganut paham pembangunan, kewenangan pembuatan kebijakan dialihkan ke regulator kuasi-otonom atau independen. Kedua, desentralisasi yang juga menjadi hal umum, adanya devolusi pembuatan kebijakan dan kontrol atas sumber daya akan kebangkitan kota-kota global dan kawasan-kota. Ketiga, internasionalisasi, untuk mendukung dan mengatur peningkatan transnasionalisasi ekonomi, badan regulasi dan peradilan telah membentuk jaringan transpemerintah untuk menyelaraskan kebijakan (Jones, 2019).

Tiongkok telah menjadi terfragmentasi, terdesentralisasi dan terinternasionalisasi, menunjukkan cara aparaturnya yang terpilah dan aktor-aktor semi-independen yang berhadapan dengan pasar semakin meningkat. Tiongkok mengembangkan kepentingan transnasional, juga memperluas kepentingannya dengan mendorong transformasi negara di tempat lain (Hameiri & Jones, 2016). Transformasi negara muncul sebagai salah satu cara pemerintahan global, memberikan perubahan dalam arsitektur pemerintahan internal negara seiring dengan pergeseran otoritas dan bahkan kedaulatan ke atas, ke bawah, dan ke samping dari tatanan yang jelas (Hameiri & Jones, 2015). Sesuai dengan pemaparan tersebut, konsep transformasi negara akan lebih sesuai ketika di sandingkan dengan teori Economic Statecraft yang peneliti gunakan sebagai kaca mata dalam melihat kasus Tiongkok terkhusus pada BUMNnya di Myanmar yang mana keduanya memiliki tujuan yang sama dalam internasionalisasi BUMN Tiongkok.

Economic Statecraft didefinisikan sebagai penggunaan sumber daya ekonomi oleh para pemimpin politik untuk memberikan pengaruh dalam mencapai tujuan kebijakan luar negeri. Di mana

para pemimpin Tiongkok menggunakan kekayaan negara untuk tujuan strategis. Hal tersebut mencakup tiga strategi utama, yaitu penyediaan modal melalui bantuan luar negeri atau investasi langsung, memperluas perdagangan melalui perjanjian perdagangan preferensial atau pengadaan negara, dan mengubah kebijakan moneter seperti pembelian obligasi luar negeri atau investasi di pasar mata uang (Reilly, 2013). Economic Statecraft digunakan Tiongkok untuk menggambarkan penggunaan sumber daya ekonomi dalam menapai tujuan-tujuan yang mencakup bidang politik, ekonomi dan strategis. Agresivitas Tiongkok dalam memberikan tekanan komersial, keinginan untuk memperluas investasi dan bantuan kepada negara-negara miskin, serta pengumuman skala global yang ambisius digunakan untuk membangun kembali infrastruktur komersial dan keuangan dunia sesuai dengan garis Sino-sentris (Breslin, 2007).

Melalui kebijakan-kebijakan Economic Statecraft Tiongkok, BUMN telah menjadi elemen kunci dalam pertumbuhan ekonomi. Beberapa motivasi komersial mendorong bisnis Tiongkok untuk melakukan ekspansi ke luar negeri. Motivasi tersebut termasuk mencari sumber daya alam, memperluas pasar untuk produk dan layanan Tiongkok, mengakses teknologi dan keahlian baru, serta memanfaatkan peluang investasi yang lebih baik di pasar global. Investasi Tiongkok di luar negeri terutama pada bidang infrastruktur dan konstruksi dipandang sebagai bagian dari strategi pencarian pasar. Sektor seperti transportasi, konstruksi perumahan, dan pembangkit listrik menyumbang sebagian besar nilai proyek yang menjadi target utama. Perusahaan konstruksi Tiongkok tertarik untuk memperluas pangsa pasarnya di luar negeri, di mana mendorong mereka untuk mengejar proyek kontrak di berbagai belahan dunia, bukan hanya proyek yang di dukung oleh pemerintahan Tiongkok.

Momentum Pendalaman Kepentingan Strategis

Situasi di Myanmar setelah kudeta militer yang terjadi pada tahun 2021 sangatlah rumit dan penuh tantangan, terutama bagi Tiongkok. Penggulingan pemerintah sipil yang dilakukan oleh militer Myanmar pada Februari 2021 mengubah lanskap politik dan ekonomi negara tersebut secara drastis. Tiongkok sebagai mitra kerjasama harus menyesuaikan strateginya dalam menghadapi pemerintahan baru yang dipimpin oleh Dewan Administrasi Negara (SAC) yang dibentuk oleh militer. Keinginan Tiongkok untuk memajukan proyek CMEC sejalan dengan tujuannya dalam mengamankan jalur komunikasi laut, terutama pada akses ke pelabuhan strategis yang akan mengurangi ketergantungan pada selat malaka. Kepentingan Tiongkok terhadap stabilitas Myanmar, mengharuskan Tiongkok sebagai aktor eksternal yang paling mungkin untuk memulai upaya mediasi dan membawa perdamaian ke Myanmar (Sithu, 2024).

Para pemimpin Tiongkok berharap bahwa perluasan hubungan ekonomi dengan Myanmar akan mencapai tujuan kebijakan dengan biaya yang tidak terlalu besar. Selain itu, tatanan ekonomi Tiongkok juga dirancang untuk memperkuat hubungan diplomatik, dengan harapan Myanmar akan mendukung

Tiongkok dalam urusan regional dan global. Hubungan ekonomi antara Tiongkok dan Myanmar menjadi semakin dalam akibat dari kuatnya kepentingan regional dan komersial Tiongkok. Di mana Tiongkok menggunakan pendekatan kerjasama ekonomi sebagai jalan dalam mewujudkan kepentingannya di Myanmar. Pendekatan tersebut merupakan teknik *Economic Statecraft* Tiongkok yang paling menonjol dan kontroversial, berupa pendanaan yang didukung negara untuk proyek-proyek besar seperti infrastruktur. Di Myanmar, proyek infrastruktur menonjol pada bidang energi yang didorong dengan kuatnya serangkaian kepentingan strategis dan komersial. Proyek infrastruktur tersebut dirancang untuk mencapai tujuan kebijakan Tiongkok dengan biaya terjangkau dan selaras dengan kepentingan para pelaku pelaksana (Reilly, 2021).

Tiongkok sebagai negara dengan perekonomian terencana, memiliki otoritas politik yang tidak tertandingi dalam perekonomian domestik. Kepentingan negara atas kekuasaan tertinggi pada sektor industri dan keuangan Tiongkok memberikan landasan bagi para pemimpinnya untuk mengadopsi pendekatan ambisius yang kuat terhadap *Economic Statecraft* atau tata negara ekonomi. Di mana Tiongkok melakukan orkestrasi dengan mengidentifikasi agen-agen yang terkait kemudian mendorong agen-agen tersebut untuk bertindak secara bersamaan yang menghasilkan kebijakan dan tujuan mereka. BRI merupakan perwujudan dari teknik ini, dirancang untuk mendorong pemerintah daerah, BUMN, dan lembaga keuangan untuk merancang, mempromosikan, mendanai, dan melaksanakan proyek infrastruktur besar di wilayah perbatasan Tiongkok dan luar negeri. Para pemimpin Tiongkok memilih jenis inisiatif *Economic Statecraft* dan merancang tujuan inisiatif tersebut agar selaras dengan prioritas para pelaku implementasi (Reilly, 2021). Melalui penggunaan strategi dan alat ekonomi, Tiongkok memiliki strategi yang terencana dan inovatif untuk mencapai visi jangka panjang mereka, ialah memperkuat pengaruh dan kekuatan mereka di dunia internasional. Tiongkok dipandang sangat menarik dari tata negara ekonominya, kemampuan untuk mewujudkan rencana jangka panjangnya didasari dengan besarnya kapasitas ekonomi dan sumber daya yang dimiliki. Sehingga, Tiongkok memiliki kemampuan untuk memanfaatkan sumber daya ekonominya secara efektif untuk memperluas pengaruhnya di tingkat global melalui berbagai bentuk kerjasama ekonomi internasional.

Tiongkok dipandang sangat menarik dari tata negara ekonominya, kemampuan untuk mewujudkan rencana jangka panjangnya didasari dengan besarnya kapasitas ekonomi dan sumber daya yang dimiliki. Penggunaan alat ekonomi ini memiliki lima karakteristik dari pengaruh *Economic Statecraft* Tiongkok, yaitu (1) kemampuan untuk menang, (2) perkalian preferensi, (3) bujukan, (4) informalitas dan (5) pengaruh yang tidak diantisipasi (Ferchen & Mattlin, 2023). Kelima karakteristik ini bertujuan untuk memperhitungkan keadaan-keadaan ketika kemungkinan besar Tiongkok mencapai hasil yang diharapkannya. Dari kelima karakteristik tersebut, sejalan hubungannya dengan Myanmar, mode perkalian preferensi tampaknya lebih dominan digunakan oleh Tiongkok ke Myanmar. Tiongkok berusaha keras untuk menyelaraskan kepentingan strategisnya dengan Myanmar, terutama melalui

investasi besar dalam proyek infrastruktur yang sejalan dengan inisiatif BRI. Dengan cara ini, Tiongkok menciptakan situasi di mana Myanmar memiliki kepentingan yang kuat untuk menjaga hubungan baik dan bekerjasama dengan Tiongkok (Goh & Steinberg, 2016).

KESIMPULAN

Penelitian ini membicarakan hubungan yang terjalin antara Tiongkok dengan Myanmar dalam pendekatan *economic statecraft* Tiongkok yang di realisasikan dibawah kerangka kerjasama *belt and road initiative* (BRI). Hubungan antara Tiongkok dan Myanmar telah mengalami perkembangan yang begitu dalam terutama pada konteks ekonomi. Sifat Tiongkok yang lebih fleksibel telah memfasilitasi konfigurasi ulang manfaat dan resiko dari proyek BRI. Tiongkok dan Myanmar sepakat memperdalam hubungan kerjasama diberbagai bidang dengan tujuan mendorong pengembangan berkelanjutan kemitraan kerjasama strategis komprehensif diantara keduanya. Koridor ekonomi Tiongkok-Myanmar (CMEC) menjadi hasil konkrit akan keterlibatan Myanmar di dalam BRI. Dalam hal ini, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Tiongkok memiliki peran utama sebagai bentuk dari perpanjangan kebijakan pemerintahan yang juga dianggap sebagai kebangkitan Tiongkok.

Tiongkok dan Myanmar sepakat memperdalam hubungan kerjasama diberbagai bidang dengan tujuan mendorong pengembangan berkelanjutan kemitraan kerjasama strategis komprehensif diantara keduanya. Koridor ekonomi Tiongkok-Myanmar (CMEC) menjadi hasil konkrit akan keterlibatan Myanmar di dalam BRI. BRI sebagai kerjasama strategis Tiongkok diarahkan pada beberapa bidang kerjasama, yaitu pembangunan infrastuktur seperti bidang transportasi dengan pembangunan kereta api dan pelabuhan serta zona ekonomi khusus ataupun pada bidang ekspansi tambang yang dipelopori langsung oleh perusahaan-perusahaan milik Tiongkok dan Myanmar. Dalam hal ini, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Tiongkok memiliki peran utama sebagai bentuk dari perpanjangan kebijakan pemerintahan yang juga dianggap sebagai kebangkitan Tiongkok.

Sejalan dengan status Tiongkok negara perekonomian terbesar kedua di dunia, penggunaan *economic statecraft* diperlihatkan Tiongkok dalam bentuk inisiatif yang lebih konkrit dan lebih agresif. Tiongkok mendorong investasi keluar oleh perusahaan-perusahaannya yang di kemas dalam kerangka BRI kemudian digambarkan sebagai hubungan keuangan, investasi dan perdagangan yang asimetris melalui sejumlah proyek transportasi, energi dan infrastruktur digital tertentu. Penginternasionalisasian BUMN dianggap sebagai upaya kerangka peraturan yang luas dan didorong oleh proses transformasi negara serta perkembangan ekonomi Tiongkok yang sejalan dengan kerangka *economic statecraft* dalam internasionalisasi BUMN Tiongkok.

DAFTAR PUSTAKA

Alauddin, A. (2021, April 9). Kudeta Militer dan Stabilitas Kawasan ASEAN. Retrieved

Maret 4, 2024, from CNBC Indonesia: <https://www.cnbcindonesia.com/opini/20210409042332-14-236409/kudeta-myanmar-dan-stabilitas-kawasan-asean>

Anam, S., & Ristiyani. (2018). Kebijakan Belt and Road Initiative (BRI) Tiongkok Pada Masa Pemerintahan Xi Jinping. *Journal Unpar*, 11-17.

Anggarawal, V. K., & Reddie, A. W. (2021). Economic Statecraft in the 21st Century: Implication for the Future of the Global Trade Regime . *World Trade Review* , 138-147.

Atkinson-Grosjean, J., & Fairley, C. (2009). *Moral Economies in Science: From Ideal to Pragmatic*. Minerva, 167.

Bi, S. (2014). Chapter 7 The Economic Relation of Myanmar-China. *Institute of Developing Economies*, 179-180.

Blanchard, J.-M. F., & Ripsman, N. M. (2013). *Economic Statecraft and Foreign Policy: Sanctions, Incentives, and Target State Calculation*. USA and Canada : Routledge .

Brautigam, D., & Xiaoyang, T. (2012). Economic Statecraft in China's New Overseas Special Economic Zones: Soft Power, Business or Resource Security? *International Affairs*, 801.

Breslin, S. (2007). *China and the Global Political Economy*. 131: Palgrave Macmillan.

Cameron, S. (2023, november 22). Why is Myanmar's New Deep-Sea Port Such Hot Property. Retrieved mei 30, 2024, from Lowy Institute: https://www-lowyinstitute-org.translate.goog/the-interpreter/why-myanmar-s-new-deep-sea-port-such-hot-property?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=tc

Chanda, J. (2021). The China Myanmar Economic Corridor: A Reality Check. *National Security*, 4(3), 275-276.

China Global Newsletter. (2023, Mei 8). Chinese Investment in Myanmar After the Coup . Retrieved Maret 9, 2024, from Inclusive Development International: <https://www.inclusivedevelopment.net/china-global-program/china-global-newsletter-eition-8/>

China Railway Eryuan Engineering Group (CREEC). (2014). China Railway Eryuan Engineering Group (CREEC). Retrieved from Devex World 2024: <https://www.devex.com/organizations/china-railway-eryuan-engineering-group-creec-39956>

CITIC Group. (2022). CITIC Group Quotes. Retrieved juni 7, 2024, from group.citic: <https://www.group.citic/en/#lastPage>

CITIC Limited . (2020). About Us. Retrieved juni 7, 2024, from citic.com: <https://www.citic.com/en/aboutus/history/>

CMEC. (2016). China Machinery Engineering Corporation. cmec.com.

Dean, K. (2022). Infrastructures and Bordering: How Chinese Projects are Ordering China-Myanmar Border Spaces . *Regional Studies Association*, 9-10.

Demir, A. (2023). The Effect of China: The BRI Project in Myanmar. *Frequency of International Relation*, 4(2), 140-141.

Eleven Media Group. (2020, februari 16). First phase of Kyaukphyu Deep Seaport project expected to cost \$1.3 bln. Retrieved mei 30, 2024, from Eleven Media Group: <https://elevenmyanmar.com/news/first-phase-of-kyaukphyu-deep-seaport-project-expected-to-cost-13-bln>

Ferchen, M., & Mattlin, M. (2023). Five Modes of China's Economic Influence: Rethinking Chinese Economic Statecraft. *Taylor & Francis Group*, 36(5), 979-989.

Fiantika, F. R. (2022). *Metodologi Penelitian Kualitatif* . PT. Global Eksekutif Teknologi, 1.

Ford, M., Gillan, M., & Thein, H. H. (2024). *Political Regimes and Economic Policy*. Routledge, 114-119.

Glendinning, A. (2023, Juni 27). Myanmar's Economic Recovery Slowed by High Prices

and Shortages. Retrieved April 14, 2024, from The World Bank: <https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2023/06/25/myanmar-s-economic-recovery-slowed-by-high-prices-and-shortages>

Goh, E., & Steinberg, D. I. (2016). *Steinberg, 3 Myanmar's Management of China Influence: From Mutual Benefit to Mutual Dependence, Rising China's Influence in Developing Asia*. Oxford University Press, 55.

Hameiri, S., & Jones, L. (2016). Rising Power and State Transformation: The Case of China. *Journal of International Relations*, 77.

Hameiti, S., & Jones, L. (2015). Global Governance as State Transformation. *Political Studies*, 3.

Henisz, W. J., & Zelner, B. A. (2003). The Strategic Organization of Political Risks and Opportunities. *Strategic Organization*, 452.

Hsu, & Munich. (2024, maret 20). Myanmar seeks Chinese funding and design assistance for Muse-Mandalay Railway Project. Retrieved from NP New: <https://npnewsmm.com/news/65fa91e99ca8270b7a40b553>

Htut, W. (2019, September 20). Myanmar and China sign MoU on Muse-Mandalay Railway Project. Retrieved from Eleven Media Group : , <https://elevenmyanmar.com/news/myanmar-and-china-sign-mou-on-muse-mandalay-railway-project>

Huaxia. (2020, Januari 18). Xi Stresses Importance of China-Myanmar "Paukphaw" Friendship. Retrieved Mei 25, 2024, from Xinhuanet: https://www-xinhuanet-com.translate.google.com/translate/goog/english/2020-01/18/c_138714298.htm?_x_tr_sch=http&_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=sc

Informa Markets. (2024). China Machinery Engineering Corporation. Retrieved juni 6, 2024, from Energy & Utilities: <https://energy-utilities.com/china-machinery-engineering-corporation-comp292506.html>

Ji, Q. (2022). The Social Barrier of Strategic Coupling: A Case Study Letpadaung Copper Mine in Myanmar. *Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI)*, 5-6.

Jianing, C. (2018, desember 13). BRI Calls for joint effort by China, Myanmar, Belt and Road Portal. Retrieved from Global Times : <https://eng.yidaiyilu.gov.cn/p/74604.html>

Jianing, C. (2018, Desember 13). BRI Calls for Joint Efforts by China, Myanmar, Belt and Road Portal. Retrieved Mei 23, 2024, from Global Times : <https://eng.yidaiyilu.gov.cn/p/74604.html>

Jing, Y. (2017). *The Transformation of Chinese Governance: Pragmatism and Incremental Adaption*. Fudan University, 37.

Johnston, L. A. (2018). *The Belt and Road Initiative: What is in it for China?* Wiley Asia & The Pacific Studies, 58.

Jones, L. (2014). *Explaining Myanmar's Regime Transition: the Periphery is Central*. Taylor & Francis, 787-792.

Jones, L. (2014). The Political Economy of Myanmar's Transition. *Journal of Contemporary Asia*, 44(1), 148.

Jones, L. (2018). Political Economy. In *Routledge Handbook of Contemporary Myanmar* (pp. 181-187). New York: Routledge.

Jones, L. (2019). Theorizing Foreign and Security Policy in an Era of State Transformation: A New Framework and Case Study of China. *Journal of Global Security Studies*, 581.

Jones, L., & Myo, K. M. (2021). *Explaining Myanmar's Response to China's Belt and Road Initiative: From Disengagement to Embrace*. Johns Hopkins University Press, 45(2), 317.

Jones, L., & Zeng, J. (2019). Understanding China's 'Belt and Road Initiative': beyond

- 'Grand Strategy' to a State Transformation Analysis. Taylor and Francis Group, 1-9.
- Jones, L., & Zou, Y. (2017). Rethinking the Role of State-owned Enterprises in China's Rise. Taylor & Francis Group, 22(4), 743.
- Kironska, K., & Jiang, D. (2023). China-Myanmar Relation after the 1 February Military Coup. ANU Press, 120-121.
- Kostecka-Tomaszewska, L., & Krukowska, M. (2021). China's Economic Statecraft: The Role of the Belt and Road Initiative. *European Research Studies Journal*, 24(2), 1026-1027.
- Kudo, T. (2006). Myanmar's Economic Relation with China: can China Support the Myanmar Economy? . *Institute of Developing Economies* , 13.
- Kyi, T. K., & Zaisheng, X. (2020). The 21st century Maritime Silk Road and the role of Myanmar. *Journal of East China Normal University (Natural Science)*, 2-3.
- Lancang-Mekong Cooperation. (2020, januari 20). The Letpadaung Copper Mine benefits Burmese. Retrieved mei 31, 2024, from Lancang-Mekong Cooperation: http://www.lmcchina.org/eng/2020-01/20/content_41450400.html
- Latief, M. N., & Idrus, P. G. (2021, maret 9). Opini: Myanmar dan dinamika hubungannya dengan China . Retrieved April 24, 2024, from Anadolu Agency: <https://www.aa.com.tr/id/berita-analisis/opini-myanmar-dan-dinamika-hubungannya-dengan-china/2174006>
- Linn, S. N. (2023, Januari 24). Myanmar Plunges Deeper Into Economic Crisis. Retrieved April 14, 2024, from East Asia Forum: <https://eastasiaforum.org/2023/01/24/myanmar-plunges-deeper-into-economic-crisis/>
- Millar, T. (2023, februari 1). The China-Myanmar Economic Corridor, 2 Years After the Coup. Retrieved mei 11, 2024, from The Diplomat: <https://thediplomat.com/2023/02/the-china-myanmar-economic-corridor-2-years-after-the-coup/>
- Min, A., & Kudo, T. (2012). Chapter 6 Newly Emerging Industrial Development Nodes in Myanmar: Ports, Roads, Industrial Zones along Economic Corridors. BRC Research Report, 190.
- NORINCO. (2014). About NORINCO. Retrieved juni 7, 2024, from <http://en.norinco.cn/col/col6486/index.html>
- Norris, W. J. (2016). Chinese Economic Statecraft: Commercial Actors, Grand Strategy, and State Control. Cornell University Press, 13-14.
- Norris, W. J. (2016). Chinese Economic Statecraft: Commercial Actors, Grand Strategy, and State Control. United State of Amerika: Cornell University Press.
- O'Connor, J. (2011). State Building, Infrastructure Development and Chinese Energy Projects in Myanmar. *Irasec Discussion Papers* , 4.
- Pei, M. (2006). Assertive Pragmatism: China's Economic Rise and its Impact on Chinese Foreign Policy. Security Studies Department , 9.
- Poling, G. B. (2018). Kyaukphyu Connecting to the Indian Ocean. *CSIS (Center for Strategic & International Studies)* , 2.
- Ramachandran, S. (2023, Juli 7). China's Collaboration with the Myanmar Junta: A Case of Strategic Hedging? . Retrieved Maret 14, 2024, from The Jamestown Foundation: <https://jamestown.org/program/chinas-collaboration-with-the-myanmar-junta-a-case-of-strategic-hedging/>
- Reilly, J. (2013). China's Economic Statecraft: Turning Wealth Into Power . *Lowy Institute For International Policy*, 2-5.
- Reilly, J. (2021). Crossing Lines: China's Economic Statecraft in Myanmar. In J. Reilly, *Orchestration: China's Economic Statecraft Across Asia and Europe* (pp. 139-151). New York: Oxford University Press.
- Reilly, J. (2021). *Orchestrating China's Economic Statecraft, Orchestration: China's Economic Statecraft Across Asia and Europe*. new york: Oxford University Press.

Rivai, A. N. (2022). Kebijakan Ekonomi Luar Negeri China dari Masa ke Masa dan Ambisi Internasionalisasi BUMN China di Tangan Xi Jinping . *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional Fajar*, 49-67.

Rivai, A. N., & Virgianita, A. (2019). China Controls Business Actors to Implement Belt and Road Initiative as Connectivity Project. *International Conference on Strategic and Global Studies* , 1-26.

Roberts, P. (2021). Economic Statecraft with Chinese Characteristics: Strange, New, and Different, or Old in New Bottles? *Journal of Current Chinese Affairs*, 50(3), 271.

Rogers, R. A. (2023). The United States' Myanmar Policy After The 2021 Military Coup and Its Prospects Under China-US Strategic Competition. *Asian Affairs: An American Review* , 261-263.

Rusandi, & Rusli, M. (2021). Merancang Penelitian Kualitatif Dasar/Deskriptif dan Studi Kasus. *Jurnal STAI DDI Makassar*, 2-3.

Sandhi Governance Institute. (2021). Belt and Road Monitoring Project: Letpadaung Copper Mine . *BRI Monitor* , 5.

Sandhi Governance Institute. (2021). Kyaukphyuk Special Economic Zone. *BRI Monitor* , 1-4.

Sandhi Governance Institute. (2021). The Muse-Mandalay Railway. *BRI Monitor* , 4-7.

Singh, M. P. (2018, November). CMEC dan Implikasi Strategisnya. Retrieved Juli 18, 2024, from <https://egrowfoundation.org/research/cmec-and-its-strategic-implications/>

Sithu. (2024, April 26). China's Engagement with the Myanmar Junta: A High Cost. Retrieved Juni 13, 2024, from *Low Returns Deal, Fulcrum Analysis on Southeast ASIA*: <https://fulcrum.sg/chinas-engagement-with-the-myanmar-junta-a-high-cost-low-returns-deal/>

Soong, J.-J., & Aung, K. H. (2020). Myanmar's Perception and Strategy Toward China's BRI Expansion on Three Major Projects Development: Hedging Strategic Framework with State-Market-Society Analysis. *The Pacific Review*, 54(1), 24.

Sun, D., & Zoubir, Y. (2018). "Development First": China's Investment in Seaport Constructions and Operations along the Maritime Silk Road. *Asian Journal of Middle Eastern and Islamic Studies*, 43.

Tessaron. (2023, desember 27). China and Myanmar Sign Deal to Complete Kyaukphyu Deep Sea Port. Retrieved mei 30, 2024, from *Atlas News* : <https://theatlasnews.co/business/2023/12/27/china-and-myanmar-sign-deal-to-complete-kyaukphyu-deep-sea-port/>

Tritto, A., & Park, A. (2020). The Belt and Road Initiative in ASEAN. *Institute For Emerging Market Studies*, 12.

W.Chan, D. S. (2021, September 2). Business as Usual: Chinese Investment After the Myanmar Coup. Retrieved Maret 9, 2024, from *Diplomat Media*: https://thediplomat-com.translate.goog/2021/09/business-as-usual-chinese-investments-after-the-myanmar-coup/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=sc

Wirayudha, R. (2017, september 6). Pura-pura Demi Burma Merdeka . Retrieved from *Historia* id: <https://historia.id/politik/articles/pura-pura-demi-burma-merdeka-D8ewR/page/1>

Wong, A. (2019, januari 22). China's Economic Statecraft under Xi Jinping. Retrieved from *Brookings*: <https://www.brookings.edu/articles/chinas-economic-statecraft-under-xi-jinping/>

Wulthow, J. (2017). China Strategic Perspectives Chinese Perspectives on the Belt and Road Initiative: Strategic Rationales, Risks, and Implications. *National Defense University Press*, 8.

Xinhua, & Rahman, M. R. (2023, Mei 3). China dan Myanmar Siap Perdalam Kerja Sama di Berbagai Bidang. Retrieved Mei 1, 2024, from *Antara*: <https://www.antaraneews.com/berita/3518730/china-dan-myanmar-siap-perdalam-kerja-sama->

di-berbagai-bidang

Yu, K. (2021). *The Belt and Road Initiative in Southeast Asia after COVID-19: China's Energy and Infrastructure Investments in Myanmar*. Singapore: ISEAS Perspective .

Yu, P.-H. (2021, maret 23). Letpadaung Copper Mine. Retrieved mei 15, 2024, from The People's Map of Global China: <https://thepeoplesmap.net/project/letpadaung-copper-mine>